



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN**

Jl. TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12740 Telp/Faks (021) 7989924

Nomor : 8.116 /DPKP/05/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Seleksi
Pendampingan Kawasan Perdesaan
Tahun 2017

Jakarta, 9 Mei 2017

Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi (dan/ atau sebutan lainnya)
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (dan/ atau sebutan lainnya)
(*sebagaimana terlampir*)

di -

Tempat

Berdasarkan target prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 yang termasuk didalamnya Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) – RPJMN Tahun 2015-2019, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, surat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor B.95/DPKP/04/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pemberitahuan Lokasi Pendampingan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT dalam Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan pendampingan kawasan perdesaan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendampingan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 akan dilaksanakan di 64 kabupaten/kota yang tersebar di 31 provinsi sebagaimana yang sudah ditetapkan, dengan menempatkan satu orang Pendamping Kawasan Perdesaan bidang manajemen dan satu orang Pendamping Kawasan Perdesaan bidang Teknis di setiap kabupaten lokasi pendampingan;
2. Setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2016, terdapat 69 orang pendamping yang memiliki kinerja baik, selanjutnya telah ditempatkan di lokasi kabupaten tahun 2017. Untuk memenuhi kebutuhan Pendamping Kawasan Perdesaan yang baru sebanyak 59 orang, maka akan dilakukan seleksi terbuka, daftar lokasi sebagaimana terlampir;
3. Sebagai langkah persiapan seleksi pendamping, kami mohon bantuan Saudara untuk menyebarluaskan informasi Lowongan Tenaga Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2017, *sebagaimana lampiran 2*. Pembukaan pendaftaran calon Pendamping Kawasan Perdesaan akan dibuka mulai tanggal 9 Mei s.d. 15 Mei 2017;
4. Seleksi akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Harlina Sulistyorini

NIP. 19680823 199303 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (sebagai laporan);
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK VI) Satker Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Surat,
Nomor : 8.116 /DPKP/105/2017
Tanggal : 9 Mei 2017
Hal : Pemberitahuan Seleksi Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2017

Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Gayo Luwes
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Dairi
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Tulang Bawang
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Jambi
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Merangin
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Wonogiri
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Jawa Timur
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Tuban
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Pamekasan
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Bali
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Tabanan
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Kalimantan Selatan
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Barito Kuala
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Kota Waringin
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Kalimantan Utara
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Nunukan
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Sulawesi Selatan
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Bantaeng
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Pinrang
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Luwu Timur
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Sulawesi Barat
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Mamuju
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Mamuju Tengah
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Sulawesi Tengah
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Buol
32. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Poso
33. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Sulawesi Tenggara
34. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Konawe Selatan
35. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Muna
36. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi NTB

37. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Sumbawa
38. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Lombok Timur
39. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Lombok Tengah
40. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi NTT
41. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Ngada
42. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Ende
43. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Lombok Timur
44. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Maluku
45. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Maluku Tengah
46. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Seram Bagian Timur
47. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Buru
48. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Maluku Utara
49. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Halmahera Timur
50. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Halmahera Barat
51. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Papua
52. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Merauke
53. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Kabupaten Jayapura
54. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (dan/ atau sebutan lainnya) Provinsi Papua Barat

Lampiran-1 surat,

Nomor : B.116/DPKP/05/2017

Tanggal : 9 Mei 2017

Hal : Pemberitahuan Seleksi Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2017

**LOKASI PENDAMPINGAN KAWASAN PERDESAAN DAN
POSISI KOSONG UNTUK SELEKSI PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2017**

NO	PROVINSI	WILAYAH DAMPINGAN	PENDAMPING TEKNIS	PENDAMPING MANAJEMEN
I	WILAYAH I			
	1 Aceh	1 Kab. Aceh Timur	√	√
		2 Kab. Gayo Lues	-	-
	2 Sumatera Utara	3 Kab. Samosir	√	√
		4 Kab. Dairi	-	-
	3 Sumatera Barat	5 Kab. Pesisir Selatan	-	√
	4 Bangka Belitung	6 Kab. Belitung	√	√
	5 Bengkulu	7 Kab. Bengkulu Utara	√	√
	6 Sumatera Selatan	8 Kab. Banyu Asin	√	√
	7 Lampung	9 Kab. Lampung Timur	√	√
		10 Kab. Tulang Bawang	-	√
	8 Jambi	11 Kab. Merangin	-	-
II	WILAYAH II			
	9 Banten	12 Kab. Lebak	√	√
		13 Kab. Pandeglang	√	√
	10 Jawa Tengah	14 Kab. Temanggung	√	√
		15 Kab. Wonogiri	-	√
		16 Kab. Blora	√	√
		17 Kab. Karanganyar	√	√
		18 Kab. Banyumas	√	√
	11 DI. Yogyakarta	19 Kab. Gunung Kidul	√	√
	12 Jawa Timur	20 Kab. Malang	√	√
		21 Kab. Tuban	√	-
		22 Kab. Bondowoso	√	√
		23 Kab. Sampang	√	√
		24 Kab. Pamekasan	√	-
	13 Jawa Barat	25 Kab. Garut	√	√
		26 Kab. Tasikmalaya	√	√
		27 Kab. Sukabumi	√	√
	14 Bali	28 Kab. Tabanan	-	-
III	WILAYAH III			
	15 Kalimantan Selatan	29 Kab. Hulu Sungai Selatan	-	√
		30 Kab. Barito Kuala	-	√
	16 Kalimantan Tengah	31 Kab. Kota Waringin Barat	-	-
	17 Kalimantan Timur	32 Kab. Kutai Kartanegara	√	√
	18 Kalimantan Utara	33 Kab. Nunukan	-	√
	19 Kalimantan Barat	34 Kab. Kubu Raya	√	√
IV	WILAYAH IV			
	20 Sulawesi Selatan	35 Kab. Bantaeng	-	-
		36 Kab. Pinrang	-	-
		37 Kab. Barru	√	-
		38 Kab. Bone	√	-
		39 Kab. Luwu Timur	-	-
	21 Sulawesi Barat	40 Kab. Mamuju Tengah	-	-
		41 Kab. Mamuju	-	-
	22 Sulawesi Tengah	42 Kab. Buol	-	-
		43 Kab. Poso	-	-
		44 Kab. Sigi	√	√
	23 Sulawesi Tenggara	45 Kab. Konawe Selatan	-	-
		46 Kab. Muna	-	-
	24 Sulawesi Utara	47 Kab. Minahasa Utara	√	√
	25 Gorontalo	48 Kab. Gorontalo	√	√

V	WILAYAH V			
	26 NTB	49 Kab. Sumbawa	√	-
		50 Kab. Lombok Timur	-	√
		51 Kab. Lombok Tengah	-	-
	27 NTT	52 Kab. Manggarai Barat	√	√
		53 Kab. Ngada	-	-
		54 Kab. Ende	-	-
		55 Kab. Rote Ndao	√	√
	28 Maluku	56 Kab. Maluku Tengah	-	-
		57 Kab. Seram Bagian Timur	-	-
		58 Kab. Buru	-	-
	29 Maluku Utara	59 Kab. Halmahera Timur	-	-
		60 Kab. Halmahera Barat	-	-
	30 Papua	61 Kab. Merauke	-	-
		62 Kota Jayapura	√	-
	31 Papua Barat	63 Kab. Manokwari	√	-
		64 Kab. Raja Ampat	√	√

Catatan : √ sudah ditempatkan pendamping

(-) belum terisi/kosong (akan dilakukan seleksi di provinsi)

Lampiran-2 surat,

Nomor : B.116/DPKP/05/2017

Tanggal : 3 Mei 2017

Hal : Pemberitahuan Seleksi Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2017

LOWONGAN TENAGA PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2017

Pendamping Kawasan Perdesaan (Bid. Manajemen)	Pendamping Kawasan Perdesaan (Bid. Teknis)
<p>a. Pendidikan minimal S-1 atau D-3, atau setara S-1 dan D-3 semua bidang ilmu;</p> <p>b. S-1 atau sederajat berpengalaman bidang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa selama 4 (empat) tahun;</p> <p>c. D-3 atau sederajat berpengalaman bidang yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa selama 6 (enam) tahun;</p> <p>d. Berpengalaman memfasilitasi kerja sama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/ kota;</p> <p>e. Berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;</p> <p>f. Berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat antar-desa dan kawasan perdesaan;</p> <p>g. Berpengalaman dalam memfasilitasi Musyawarah Desa dan/ atau Antar Desa;</p> <p>h. Memiliki kemampuan dalam teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa dan atau antar-desa;</p> <p>i. Mengenal adat istiadat, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk diantaranya mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kabupaten setempat;</p> <p>j. Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS Office (MS Word dan MS Excel), serta mampu memanfaatkan layanan email;</p> <p>k. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan;</p> <p>l. Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dalam tim;</p> <p>m. Pada saat melakukan pendaftaran, usia maksimal 50 (lima puluh tahun);</p> <p>n. Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup kabupaten/kota lokasi tugas.</p>	<p>a. Pendidikan minimal Strata S-1 atau D-3, atau setara S-1 dan D-3, diutamakan bidang ilmu teknik lingkungan, bioteknologi, atau teknologi pertanian;</p> <p>b. S-1 atau sederajat memiliki pengalaman minimal bidang pemberdayaan masyarakat desa selama 4 (empat) tahun;</p> <p>c. D-3 atau sederajat memiliki pengalaman minimal bidang pemberdayaan 6 (enam) tahun untuk lulusan D-3.</p> <p>d. Berpengalaman memfasilitasi kerja sama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/ Kota;</p> <p>e. Berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;</p> <p>f. Berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat antar-desa dan kawasan perdesaan;</p> <p>g. Memiliki kemampuan melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa dan atau antar-desa;</p> <p>h. Berpengalaman memfasilitasi pengembangan wilayah/ lingkungan dan kegiatan lain yang bersifat kawasan;</p> <p>i. Mengenal adat istiadat, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk diantaranya mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kabupaten setempat;</p> <p>j. Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS Office (MS Word dan MS Excel), serta mampu memanfaatkan layanan email;</p> <p>k. Mampu berkomunikasi dengan baik, dengan Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan;</p> <p>l. Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dalam tim;</p> <p>m. Pada saat melakukan pendaftaran, usia maksimal 50 (lima puluh tahun);</p> <p>n. Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup kabupaten/kota lokasi tugas.</p>

Berkas lamaran ditujukan kepada Satker Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan ke alamat :

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Republik Indonesia
Cq. PPBJ- Seleksi Pendamping Kawasan Perdesaan
Gedung B, Lantai 3 Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740, cap pos tanggal 17 Mei 2017

Atau via E-mail paling lambat tanggal 17 Mei 2017 :

kspkvwilayah1@gmail.com : untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung dan Jambi

kspkvwilayah2@gmail.com : untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali

kspkvwilayah3@gmail.com : untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara

kspkvwilayah4@gmail.com : untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara,

kspkvwilayah5@gmail.com : Untuk Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Hasil seleksi aktif diumumkan di media informasi provinsi, melalui email peserta, atau sms kepada peserta yang mengikuti seleksi.

